Jurnal Kajian Ruang Vol 6 No 2
September 2026
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr

Peran Aksesibilitas dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Publik yang Inklusif di Kota Ambon

Edwin Excell Efruan[1], Atrida Hadianti[1*]
[1] Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Email : atrida.h@ugm.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of accessibility in creating inclusive public open spaces in the city of Ambon, focusing on two coastal public open space locations, namely Wainitu Beach and Amahusu Beach. The aim of this research is to measure the inclusivity level of public spaces based on public perception, viewed from two dimensions of accessibility: internal and external access. The methodology employed is a descriptive quantitative approach with data collection through questionnaires, interviews, and direct observations. The analysis is conducted using descriptive statistics and spatial analysis. The results show that both public open space locations have a relatively good inclusivity level, with average scores falling within the high category for both internal and external access. However, there are several aspects that still need improvement, such as facilities for vulnerable groups (people with disabilities, the elderly, and children), as well as ease of transportation access and parking areas. This study is expected to provide recommendations to the government to enhance the quality of public open spaces in Ambon City, making them more inclusive and accessible to all segments of society, supporting the goals of sustainable development, and aligning with the "Right to the City" principle, which is also relevant to achieving Goal 11 of the Sustainable Development Goals (SDGs), emphasizing the importance of providing safe, inclusive, and accessible public spaces for everyone, particularly for vulnerable groups.

Keywords: *Accessibility, Inclusivity, Public Open Space, Ambon City*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran aksesibilitas dalam mewujudkan ruang terbuka publik yang inklusif di Kota Ambon, berfokus pada dua lokasi ruang terbuka publik pesisir, yaitu Pantai Wainitu dan Pantai Amahusu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat inklusivitas ruang publik berdasarkan persepsi masyarakat, dilihat dari dua dimensi aksesibilitas, yaitu akses internal dan eksternal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lokasi ruang terbuka publik memiliki tingkat inklusivitas yang cukup baik, dengan skor rata-rata yang masuk dalam kategori tinggi untuk akses internal dan eksternal. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti fasilitas untuk kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak), serta kemudahan akses transportasi dan area parkir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka publik di Kota Ambon, agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip "*Right to the City*" yang juga relevan dengan pencapaian Tujuan 11 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pentingnya menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua, khususnya bagi kelompok rentan.
Kata kunci: Aksesibilitas, Inklusivitas, Ruang Terbuka Publik, Kota Ambon

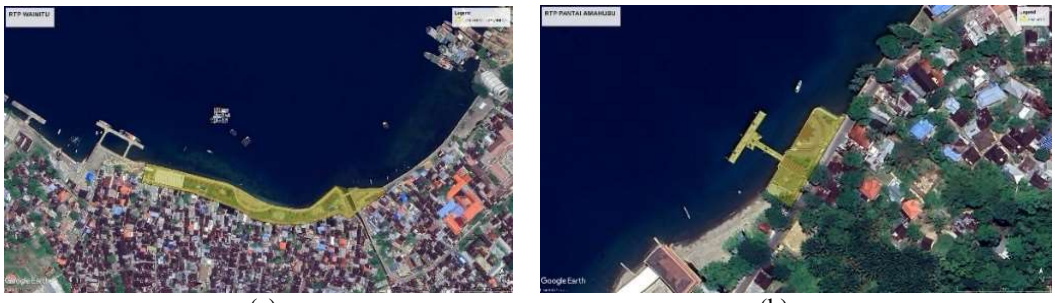
1. PENDAHULUAN

Ruang terbuka publik memegang peran penting dalam struktur perkotaan karena berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, budaya, dan ekspresi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Konsep "*Right to the City*" oleh Lefebvre (1996) menekankan bahwa ruang publik merupakan hak setiap warga untuk mengakses ruang

kota secara adil dan setara. Idealnya, ruang publik harus terbuka, aman, inklusif, dan bebas hambatan agar dapat menampung beragam aktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tujuan 11 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya menyediakan akses universal terhadap ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (*United Nations*, 2015).

Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, merupakan kota pesisir dengan topografi berbukit yang mengakibatkan terbatasnya lahan datar dan berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka publik. Meskipun jumlahnya sudah cukup banyak, distribusi ruang publik masih terpusat di kecamatan tertentu seperti Sirimau dan Nusaniwe, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan spasial dalam akses masyarakat (Ufie, 2021). Tantangan terkait aksesibilitas, minimnya fasilitas ramah disabilitas, dan dominasi kelompok tertentu sering kali menghambat pemanfaatan ruang publik secara merata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji inklusivitas ruang publik di Kota Ambon, terutama dalam konteks sosial budaya lokal seperti konsep "katong samua orang basudara" yang menekankan persaudaraan dan kehidupan berdampingan dalam keberagaman.

Salah satu tipologi ruang publik yang berkembang di Kota Ambon adalah ruang terbuka publik berbasis pesisir, seperti dapat dilihat di Gambar 1 bahwa Pantai Wainitu (a) dan Pantai Amahusu (b) yang menjadi lokasi penelitian kali ini.



(a) (b)

Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: *Google Earth* (2026)

Kedua lokasi ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai “etalase” dalam hal ini juga pusat aktivitas masyarakat dan mendukung sektor pariwisata, ekonomi, dan sosial budaya. Meskipun demikian, kedua ruang publik pesisir ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas, fasilitas inklusif, dan keterhubungan dengan permukiman warga. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh

mana ruang publik pesisir di Kota Ambon mampu mewujudkan prinsip inklusivitas, dengan mempertimbangkan baik akses eksternal (kemudahan mencapai ruang publik dari lingkungan sekitarnya) maupun akses internal (kualitas fasilitas dan kenyamanan di dalam ruang publik).

Akses internal di ruang terbuka publik mengacu pada kemudahan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam ruang publik tersebut. Gehl (2011) menekankan bahwa kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh desain pada skala manusia, di mana jalur pedestrian yang aman dan bebas hambatan, ketersediaan tempat duduk, perlindungan terhadap cuaca, serta pencahayaan yang memadai menjadi faktor penentu apakah masyarakat akan bertahan beraktivitas atau justru meninggalkan suatu ruang publik. *Project for Public Spaces* (2005) melengkapi perspektif ini dengan mengidentifikasi empat aspek kunci ruang publik yang berhasil, yaitu aksesibilitas dan keterhubungan (*access and linkages*), kenyamanan dan citra (*comfort and image*), kegunaan dan aktivitas (*uses and activities*), serta keramahan dan sosiabilitas (*sociability*). Dalam kerangka ini, akses internal bukan hanya soal kemudahan fisik untuk bergerak di dalam ruang, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas yang mendukung keberagaman aktivitas, rasa aman, serta desain yang ramah bagi seluruh kelompok pengguna termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Soja (2010) menambahkan dimensi keadilan spasial (*spatial justice*) dengan berargumen bahwa distribusi fasilitas dan kualitas desain di dalam ruang publik tidak boleh menciptakan hierarki penggunaan yang mendiskriminasi kelompok tertentu, sehingga setiap fasilitas harus dapat diakses dan dinikmati secara setara oleh semua pengguna.

Sementara itu, akses eksternal berkaitan dengan keterjangkauan suatu ruang publik dari lingkungan sekitarnya. Litman (2025) menekankan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan jarak fisik, tetapi juga mencakup kemudahan mobilitas, ketersediaan pilihan transportasi, kualitas jaringan jalan, serta keterjangkauan biaya perjalanan, sehingga ruang publik yang sulit dijangkau karena keterbatasan moda transportasi atau biaya yang tinggi pada hakikatnya belum memenuhi prinsip aksesibilitas yang sesungguhnya. Gehl (2011) menyoroti bahwa jarak berjalan kaki yang wajar, ketersediaan jalur pejalan kaki yang aman, serta integrasi dengan halte atau titik transit menjadi penentu utama tingkat kunjungan suatu ruang publik. *Project for Public Spaces* (2005) memperkuat argumen ini melalui aspek *access and linkages*, yang menyatakan bahwa ruang publik yang berhasil adalah ruang yang mudah dilihat, mudah dijangkau,

dan terhubung baik dengan area sekitarnya. Soja (2010) memberikan perspektif kritis tambahan dengan menegaskan bahwa ketimpangan dalam akses eksternal merupakan manifestasi dari ketidakadilan spasial yang lebih luas, di mana kelompok masyarakat tertentu secara sistematis memiliki akses yang lebih terbatas karena lokasi tempat tinggal, keterbatasan ekonomi, atau kurangnya infrastruktur transportasi di wilayah mereka.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inklusivitas ruang terbuka publik pesisir dengan menitikberatkan pada dimensi aksesibilitas internal dan eksternal. Kajian pada RTP Pantai Wainitu dan RTP Pantai Amahusu memiliki relevansi strategis dengan arah pembangunan Kota Ambon yang menekankan nilai inklusivitas, toleransi, dan keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, serta dengan upaya pemenuhan indikator Kota Layak Anak melalui Evaluasi KLA 2025. Dalam penelitian ini, inklusivitas dipahami tidak semata-mata sebagai ketersediaan fasilitas fisik di dalam ruang publik, tetapi juga sebagai hasil keterkaitan antara kualitas akses internal, keterjangkauan transportasi, konektivitas kawasan, dan kemudahan pencapaian lokasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian inklusivitas ruang terbuka publik pesisir di Kota Ambon melalui integrasi dua dimensi aksesibilitas, yakni akses internal dan akses eksternal, dalam konteks kota kepulauan yang masih belum banyak dikaji. Berbeda dari studi ruang publik yang umumnya berfokus pada taman atau alun-alun dan menitikberatkan pada aspek fisik internal, penelitian ini menunjukkan bahwa inklusivitas ruang publik juga ditentukan oleh keterjangkauan transportasi, konektivitas kawasan, dan kemudahan pencapaian lokasi. Selain itu, penelitian ini membandingkan dua RTP pesisir dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui persepsi masyarakat yang dipadukan dengan observasi dan analisis spasial sederhana, sehingga menghasilkan kontribusi empiris dan praktis bagi perencanaan ruang publik inklusif di Ambon maupun menjadi referensi bagi kota-kota kepulauan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deduktif kuantitatif deskriptif untuk mengukur peran aksesibilitas dalam mendukung ruang terbuka publik yang inklusif. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif serta analisis spasial sederhana menggunakan *google earth* untuk melihat gambaran lokasi penelitian dan keterjangkauan ruang publik dari lingkungan sekitarnya. Inklusivitas kedua lokasi penelitian dinilai berdasarkan akses internal serta akses eksternal, seperti yang tertera di Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Aspek/Parameter	Variabel	Indikator	Sumber
Kualitas pengalaman pengguna di dalam ruang publik	**Akses Internal**	Jalur pedestrian, jalur sepeda, ramah anak, fasilitas kaum khusus, rasa aman, pencahayaan (penerangan), pelarangan kalangan tertentu, kondisi fasilitas umum, kemudahan menggunakan fasum, keberagaman aktivitas dan kejelasan *signage* di lokasi.	Gehl (2011), PPS (2005), Soja (2010)
Keterjangkauan ruang publik dari lingkungan sekitar.	**Akses Eksternal**	Akses pintu masuk ke area, waktu operasional dan biaya masuk, keterlihatan *view*, akses dengan angkutan umum, area parkir, *signage* ke lokasi dan frekuensi berkunjung.	Litman (2025), Gehl (2011), PPS (2005), Soja (2010)

Sumber: Penulis (2026)

Dalam penelitian ini, sampel diambil secara proporsional dari lima kecamatan di Kota Ambon menggunakan teknik *proportional random sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 207 orang. Jumlah ini didasarkan pada teori Arkin dan Colton (1963), yang menyatakan bahwa jika ukuran populasi di atas 100.000 dan *margin of error* ±3%, jumlah sampel minimal adalah 202 orang, berlaku pada *confidence level* 95%. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memastikan representasi yang akurat dari setiap kecamatan sesuai dengan jumlah penduduknya. Detail pembagian dan sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian Sample menurut Besaran Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Presentase	Sampel
Kecamatan Sirimau	148742	42%	86
Kecamatan Nusaniwe	91574	26%	54
Kecamatan Leitimur Selatan	10207	3%	6
Kecamatan TA Baguala	61271	17%	34
Kecamatan Teluk Ambon	45495	13%	27
Jumlah Penduduk	**357.289**	**100%**	**207**

Sumber: BPS Kota Ambon (2025), Penulis (2026)

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuisioner untuk mengukur persepsi masyarakat tentang inklusivitas ruang terbuka publik. Dokumentasi mendukung data survei primer, seperti peraturan terkait dan foto/video relevan. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian Tabel 1 dan menggunakan menggunakan skala Likert 4 poin (*forced-choice scale*) pada Tabel 3 bertujuan untuk mengurangi bias kecenderungan memilih jawaban netral dan meningkatkan ketegasan respon (Boone & Boone, 2012). Data kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata

skor responden pada setiap indikator untuk menentukan tingkat inklusivitas ruang terbuka publik, yang dibagi berdasarkan interval dan diinterpretasikan dalam kategori sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi seperti yang terlihat pada Tabel 4.

$$\textbf{Interval} = \frac{Skor\ Tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Kategori} = \frac{4-1}{4} = \mathbf{0{,}75}$$

Tabel 3. Skala Likert

Skala Likert	
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013), Boone et al. (2012)

Tabel 4. Interpretasi Penilaian Variabel

Nilai Mean	Interprestasi
1.00 – 1.75	Sangat Rendah
1.76 – 2.50	Rendah
2.51 – 3.25	Tinggi
3.26 – 4.00	Sangat Tinggi

Sumber: Penulis (2026)

Selanjutnya, uji kuisioner validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 sampel uji awal yang berbeda dengan responden utama, untuk memastikan instrumen dapat mengukur secara tepat (validitas) seperti yang terlihat di Tabel 5 dan konsisten (reliabilitas) pada Tabel 6. Hal ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aksesibilitas mempengaruhi inklusivitas ruang terbuka publik di Kota Ambon.

$$df = n - 2$$
$$df = 30 - 2 = 28$$

Pada taraf signifikansi α = 0,05 *(two tailed)*: **r tabel = 0,361**

Tabel 5. Uji Validitas Kuisioner

Item	Label	r Hitung RTPW	r Hitung RTPA	r Tabel	Ket.
	Akses Internal				
P1	Jalur Pedestrian	0,603	0,682	0,361	**Valid**
P2	Jalur Sepeda	0,593	0,579	0,361	**Valid**
P3	Ramah Anak	0,622	0,684	0,361	**Valid**
P4	Fasilitas Kaum Khusus	0,657	0,659	0,361	**Valid**
P5	Rasa Aman	0,779	0,718	0,361	**Valid**
P6	Pencahayaan (Penerangan)	0,755	0,707	0,361	**Valid**
P7	Pelarangan Kalangan Tertentu	0,603	0,649	0,361	**Valid**
P8	Kondisi Fasilitas Umum	0,712	0,765	0,361	**Valid**
P9	Penggunaan Fasum	0,716	0,768	0,361	**Valid**
P10	Keberagaman Aktivitas	0,796	0,736	0,361	**Valid**
P11	Kejelasan Signage di Lokasi	0,746	0,843	0,361	**Valid**
	Akses Eksternal				
P12	Akses Pintu Masuk ke Area	0,700	0,803	0,361	**Valid**
P13	Operasional dan Biaya	0,516	0,557	0,361	**Valid**
P14	Keterlihatan View	0,601	0,649	0,361	**Valid**
P15	Akses dengan Angkutan Umum	0,624	0,831	0,361	**Valid**
P16	Area Parkir	0,727	0,774	0,361	**Valid**
P17	Signage ke Lokasi	0,746	0,606	0,361	**Valid**

Sumber: Penulis (2026)

Tabel 6. Uji Reliabilitas Kuisioner

Variabel	Jumlah Item	Cronbach (α)	Ket.
Akses Internal RTPW	11	0,888	**Reliabel**
Akses Eksternal RTPW	6	0,759	**Reliabel**
Akses Internal RTPA	11	0,886	**Reliabel**
Akses Eksternal RTPA	6	0,832	**Reliabel**

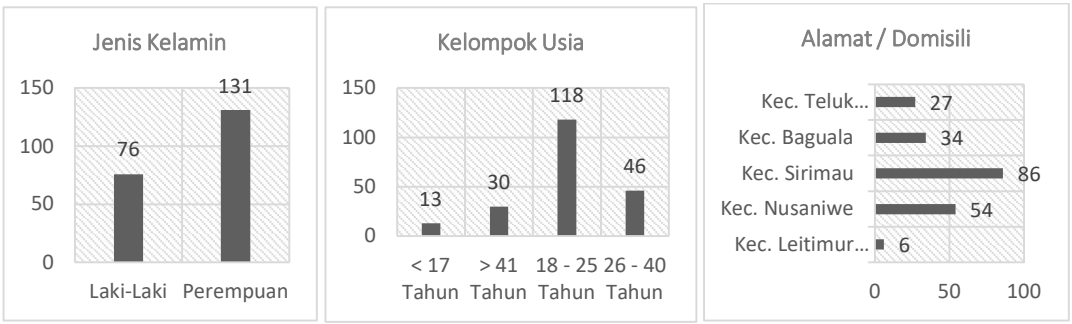
Sumber: Penulis (2026)

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan agar kuisioner menghasilkan data yang valid dan konsisten. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki korelasi di atas 0,361, sehingga dinyatakan valid. Selain itu, instrumen dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* semua item di atas 0,6 (Sugiyono, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 207 responden dari lima kecamatan di Kota Ambon yang telah mengunjungi ruang terbuka publik di RTP Pantai Wainitu dan RTP Pantai Amahusu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran aksesibilitas, baik internal maupun eksternal, dalam menciptakan ruang terbuka publik yang inklusif di Kota Ambon. Sebelum itu, penting untuk memahami karakteristik responden, yang mencakup jenis kelamin, usia, dan domisili.



(a) (b) (c)

Gambar 2. Karakteristik Responden
Sumber: Penulis (2026)

- Jenis Kelamin

Gambar 2 (a) menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan (63%, 131 orang), sementara laki-laki 37% (76 orang). Dominasi responden perempuan mengindikasikan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan di ruang terbuka publik sudah

baik, yang berperan penting dalam menarik partisipasi perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pereira et al. (2024), yang menyatakan bahwa perempuan lebih sering memanfaatkan ruang publik untuk aktivitas sosial dan rekreasi, dengan faktor keamanan dan kenyamanan yang sangat berpengaruh pada keputusan mereka untuk berpartisipasi.

- Kelompok Usia

Gambar 2 (b) menunjukkan mayoritas responden berusia 18-25 tahun (57%, 118 orang), diikuti oleh usia 26-40 tahun (22%), lebih dari 41 tahun (15%), dan di bawah 17 tahun (6%). Temuan ini mengindikasikan bahwa kelompok usia muda produktif adalah pengguna utama ruang terbuka publik di Ambon. Penelitian (Putri et al., 2024) menyatakan bahwa generasi muda memilih ruang publik untuk bersosialisasi dan membangun komunitas. Selain itu, Ihsanti & Widiyani (2024) menemukan bahwa ruang publik yang ramah anak muda lebih sering digunakan untuk aktivitas sosial dan rekreasi, mendukung gagasan bahwa ruang terbuka publik di Ambon menjadi tempat penting bagi generasi muda.

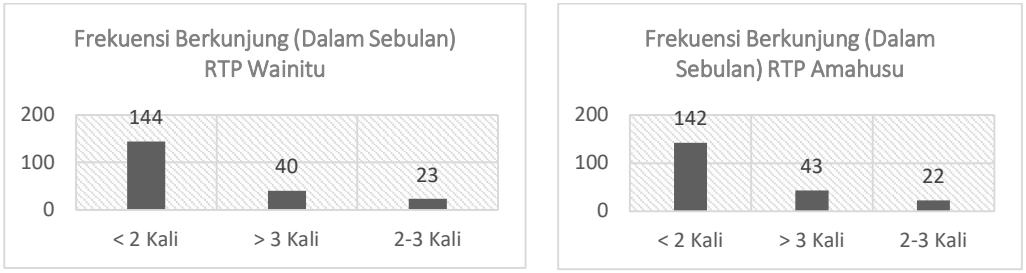
- Alamat / Domisili

Responden berasal dari seluruh kecamatan di Kota Ambon, dengan jumlah terbesar dari Kecamatan Sirimau (86 orang), diikuti oleh Kecamatan Nusaniwe (54 orang), Teluk Ambon Baguala (34 orang), Teluk Ambon (27 orang), dan Leitimur Selatan (6 orang). Distribusi pada Gambar 2 (c) mencerminkan representasi proporsional dari berbagai kecamatan, sesuai metode sampling yang digunakan. Keberagaman responden ini mencerminkan beragam persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka publik di tingkat lokal. Studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mempengaruhi bagaimana ruang publik dipahami dan digunakan (Li et al., 2025), serta pentingnya pandangan warga mengenai kenyamanan, keamanan, dan fungsi sosial dalam perencanaan ruang kota (Kusuma, 2024). Pendekatan yang mempertimbangkan persepsi berbagai kelompok masyarakat sangat penting untuk memastikan ruang terbuka publik memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh kecamatan.

b) Frekuensi Kunjungan

Mayoritas responden mengunjungi RTP Pantai Wainitu Gambar 3 (a) kurang dari dua kali dalam sebulan (144 responden), sementara 40 responden mengunjungi lebih dari tiga kali sebulan, dan 23 responden mengunjungi antara dua hingga tiga kali. Pola serupa

terlihat pada RTP Pantai Amahusu Gambar 3 (b), di mana mayoritas responden mengunjungi ruang publik ini kurang dari dua kali dalam sebulan.



(a) (b)

Gambar 3. Frekuensi Kunjungan Responden
Sumber: Penulis (2026)

Hal ini menunjukkan bahwa kedua lokasi ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai destinasi rekreasi atau wisata lokal, bukan sebagai tempat aktivitas harian rutin. Temuan ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa ruang terbuka publik yang dirancang sebagai ruang rekreasi cenderung digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan leisure dan interaksi sosial, serta sebagai bagian dari pengalaman kualitas hidup saat waktu senggang (Wang et al., 2025). Selain itu, penelitian di Surabaya juga menggambarkan bagaimana ruang terbuka hijau dan publik banyak berfungsi sebagai tempat rekreasi, bersantai, dan menikmati lingkungan, daripada digunakan untuk aktivitas harian sehari-hari (Muhaling et al., 2023).

c) Analisis Akses Internal

Tabel 7. Analisis Akses Internal RTP Pantai Wainitu & Pantai Amahusu

Indikator Akses Internal	RTP Pantai Wainitu	RTP Pantai Amahusu
Jalur pedestrian (pejalan kaki) cukup luas dan aman	**3,02**	**2,91**
Memiliki ketersediaan jalur sepeda yang cukup	**2,99**	**2,58**
Ketersediaan fasilitas ramah anak	**2,86**	**2,49**
Ketersediaan fasilitas untuk kalangan khusus	**2,56**	**2,44**
Apakah anda merasa aman saat berada di area ini	**2,86**	**2,97**
Pencahayaan/Penerangan sudah memadai	**2,77**	**2,84**
Adanya pelarangan pada kalangan tertentu	**2,33**	**2,39**
Kondisi fasilitas umum terawat dengan baik	**2,62**	**2,58**
Kemudahan menggunakan fasilitas umum di area	**2,75**	**2,70**
Area ini menwarkan beragam kegiatan	**2,81**	**2,86**
Kejelasan informasi melalui signage di area ini	**2,73**	**2,93**

Sumber: Penulis (2026)

1. Akses Internal RTP Pantai Wainitu

Hasil penelitan RTP Pantai Wainitu pada Tabel 7, menunjukan indikator dengan skor tertinggi adalah jalur pejalan kaki (3,02), yang berarti fasilitas jalur pejalan kaki di area

ini cukup memadai dan nyaman. Hal ini bisa terlihat pada Gambar 4 (a, b, c dan d), yang menggambarkan jalur pejalan kaki yang terawat dan cukup luas untuk diakses oleh masyarakat. Demikian dengan jalur sepeda juga mendapatkan skor tinggi (2,99), meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Ini menunjukkan adanya fasilitas pedestrian yang mendukung masyarakat sebagai pengguna bisa nyaman menikmati kegiatannya dengan baik. Namun, indikator dengan skor terendah mencakup pembatasan kalangan tertentu (2,33), fasilitas untuk kalangan khusus (2,56), dan kondisi fasilitas umum (2,62). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas, lansia, serta fasilitas umum lainnya. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 (e) dan (f) menunjukan bahwa fasilitas yang ada, seperti toilet difabel, masih tampak kurang terawat, meskipun sudah disediakan. Selain itu, pada jalan masuk menuju area, tidak ditemukan fasilitas ramah disabilitas atau lansia seperti ramp, yang mengharuskan pengguna untuk melewati anak tangga. Sehingga walaupun nilai untuk fasilitas umum maupun khusus sudah masuk kategori tinggi, namun masih ada keterbatasan untuk kalangan tertentu yang berada pada kategori rendah. Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas fasilitas umum ini sangat penting agar ruang publik dapat lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.



Gambar 4. Suasana Ruang Terbuka Publik Pantai Wainitu
Sumber: *Google Earth* (diolah), Dokumentasi Penulis (2026)

2. Akses Internal RTP Pantai Amahusu

Hasil analisis akses internal pada RTP Pantai Amahusu pada Tabel 7 menunjukkan bahwa faktor dengan skor tertinggi adalah rasa aman (2,97). Hal ini tercermin pada Gambar 5 (a) dan (c), yang menunjukkan area dengan pemandangan terbuka serta kualitas pencahayaan yang baik, yang mendukung rasa aman pengunjung yang datang ke lokasi ini. Ditambah dengan luasan area yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan

Pantai Wainitu, menciptakan suasana yang lebih nyaman. Kejelasan signage (2,93), seperti yang terlihat pada Gambar5 (b), menunjukkan adanya papan informasi mengenai area ini dan potensi wisata di sekitarnya. Sementara itu, fasilitas jalur pejalan kaki (2,91), yang terlihat pada Gambar 5 (a), juga mendapatkan skor tinggi, yang mengindikasikan bahwa fasilitas untuk aksesibilitas di ruang publik ini sudah cukup memadai. Namun, fasilitas untuk kalangan khusus, seperti penyandang disabilitas dan fasilitas ramah anak, masih kurang memadai, dengan skor 2,44 dan 2,49. Hal ini terlihat pada Gambar 5 (e) dan (f), di mana fasilitas yang ramah disabilitas masih terbatas, dan area publik tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna dengan mobilitas terbatas atau keluarga dengan anak-anak. Selain itu, ruang terbuka publik ini langsung terhubung dengan dermaga, seperti yang terlihat pada Gambar 5 (d), namun tidak ada pengaman seperti pagar. Oleh karena itu, fasilitas seperti jalur untuk kursi roda dan ruang bermain anak yang nyaman dan aman masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan inklusivitas dan memastikan ruang ini dapat diakses oleh semua kalangan.



Gambar 5. Suasana Ruang Terbuka Publik Pantai Amahusu
Sumber: *Google Earth* (diolah), Dokumentasi Penulis (2026)

d) Analisis Akses Eksternal

Tabel 8. Analisis Akses Eksternal RTP Pantai Wainitu & Pantai Amahusu

Indikator Akses Eksternal	RTP Pantai Wainitu	RTP Pantai Amahusu
Kemudahan menemukan lokasi pintu masuk	**2,43**	**3,01**
Waktu operasional dan biaya sudah terjangkau	**2,71**	**2,73**
Memiliki pemandangan yang menarik (*visibility*)	**3,14**	**3,18**
Area mudah diakses dengan angkutan umum	**2,60**	**3,06**
Tempat parkir di area ini memadai/mudah diakses	**2,93**	**2,76**
Terdapat tanda/petunjuk dalam mengenali lokasi ini	**2,77**	**2,99**

Sumber: Penulis (2026)

1. Akses Eksternal RTP Pantai Wainitu

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 6 (a) dan (c), terlihat bahwa visibility ruang yang baik di RTP Pantai Wainitu memberikan daya tarik utama bagi pengunjung dengan skor

tertinggi (3,14). Keindahan alam sekitar, terutama jalur pejalan kaki dan area yang menghadap laut, meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sementara itu, Gambar 6 (b) menunjukkan area parkir yang memadai dengan skor (2,93). Namun, indikator kemudahan menemukan pintu masuk (2,43) dan akses transportasi umum (2,60) masih menjadi kendala, tercermin pada Gambar 6 (d) yang menunjukkan kurangnya petunjuk arah. Selain itu, posisi pantai yang jauh dari jalan utama (garis kuning) menyebabkan angkutan umum tidak menjangkau area hingga area pantai dan berpotensi menyulitkan akses pengunjung yang mengandalkan angkutan umum.



Gambar 6. Suasana Sekitar Ruang Terbuka Publik Pantai Wainitu
Sumber: *Google Earth* (diolah), Dokumentasi Penulis (2026)

2. Akses Eksternal RTP Pantai Amahusu

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 7 (a) dan (b), pemandangan yang menghadap langsung ke pantai menjadi daya tarik utama di RTP Pantai Amahusu, dengan skor tertinggi (3,18). Keindahan alam sekitar meningkatkan kenyamanan pengunjung, memberikan suasana menyegarkan. Akses angkutan umum juga mudah dijangkau dengan skor (3,06), karena lokasi pantai berada di jalan utama (garis kuning pada peta). Namun, fasilitas parkir di area ini, meskipun mendapat skor (2,76), masih kurang memadai, terutama parkir di bahu jalan yang dapat menghambat sirkulasi kendaraan seperti yang terlihat di Gambar 7 (c) dan (d). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas parkir untuk kenyamanan pengunjung, terutama saat ada event di lokasi nantinya.



Gambar 7. Suasana Sekitar Ruang Terbuka Publik Pantai Amahusu
Sumber: *Google Earth* (diolah), Dokumentasi Penulis (2026)

e) Pembahasan Aksesibilitas dan Inklusivitas Ruang Terbuka Publik

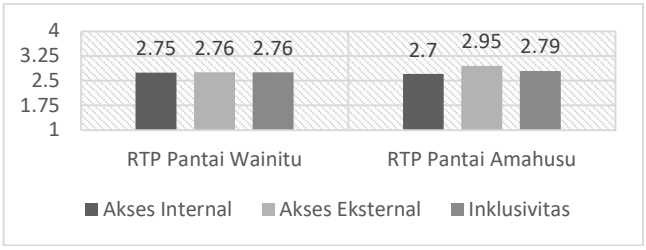


Diagram 8. Aksesibilitas dan Inklusivitas Kedua Ruang Terbuka Publik
Sumber: Penulis (2026)

Kedua lokasi penelitian memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, namun keduanya menunjukkan inklusivitas yang baik dilihat pada gambar 8. Pentingnya akses transportasi eksternal yang baik, sebagaimana diungkapkan oleh Li et al. (2025), tercermin pada RTP Pantai Amahusu yang memiliki skor akses eksternal lebih tinggi (2,95), mendukung kemudahan partisipasi pengunjung, khususnya mereka yang mengandalkan angkutan umum. Namun, temuan pada penelitian menjelaskan bahwa kedua RTP memiliki skor inklusivitas "tinggi" tetapi masih lemah pada akses internal khususnya pada indikator fasilitas kelompok rentan yang menunjukkan indikasi inklusivitas yang belum menyeluruh. Penelitian Kusuma et al. (2024) serta Putri & Suranto (2026) menunjukkan bahwa ruang publik harus menyediakan fasilitas inklusif untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Oleh karena itu perlu untuk melihat bagaimana implikasi dari penelitian ini yang akan dijelaskan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Implikasi Penelitian

Aspek	Temuan	Implikasi Perencanaan
Jalur Pejalan Kaki dan Aksesibilitas Fisik (Skor Tinggi di RTP Wainitu, Skor Lebih Rendah di RTP Amahusu)	RTP Pantai Wainitu menunjukkan kualitas jalur pejalan kaki yang relatif lebih baik dibandingkan RTP Pantai Amahusu, sehingga lebih nyaman digunakan oleh pejalan kaki. Sebaliknya, RTP Pantai Amahusu masih menunjukkan keterbatasan pada kualitas jalur, lebar sirkulasi, dan dukungan aksesibilitas fisik bagi semua pengguna.	Perencanaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas jalur pejalan kaki, terutama di RTP Pantai Amahusu, melalui pelebaran jalur, penyediaan permukaan yang stabil dan tidak licin, ramp, guiding block, serta konektivitas yang jelas antara pintu masuk, area aktivitas, dan fasilitas utama untuk mendukung aksesibilitas universal.
Area Parkir (Skor Cukup Baik di RTP Wainitu, Masih Memiliki Kekurangan di RTP Amahusu)	Skor area parkir yang lebih rendah di RTP Pantai Amahusu menunjukkan bahwa fasilitas parkir di lokasi ini masih memerlukan penataan yang lebih baik agar tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan kenyamanan pengunjung. Sementara itu, RTP Pantai Wainitu memiliki kondisi parkir yang relatif lebih baik, meskipun masih dapat ditingkatkan.	Perencanaan perlu menata area parkir secara lebih terstruktur melalui pengaturan kapasitas, zonasi kendaraan, sirkulasi keluar-masuk, dan penempatan signage yang jelas. Selain itu, perlu disediakan ruang parkir prioritas bagi penyandang disabilitas serta akses yang lebih mudah dari area parkir menuju ruang publik utama.
Visibility dan Keamanan (Skor Tinggi pada Kedua Lokasi)	Skor tinggi pada kedua lokasi menunjukkan bahwa visibilitas dan rasa aman telah terbentuk dengan cukup baik, terutama melalui pencahayaan dan keterbukaan ruang yang mendukung kenyamanan pengunjung.	Perencanaan perlu memastikan bahwa seluruh area ruang terbuka publik memiliki pencahayaan yang memadai, serta memastikan tidak ada area yang gelap dan terisolasi. Penambahan pagar pengaman di area yang berisiko tinggi, seperti di dekat dermaga atau tempat-tempat yang memiliki perbedaan elevasi yang tajam, bisa meningkatkan keselamatan bagi pengunjung yang rentan, seperti anak-anak dan lansia.
Fasilitas untuk Kelompok Rentan (Skor Rendah untuk Fasilitas Difabel, Lansia dan Anak)	Rendahnya skor fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak menunjukkan bahwa kedua lokasi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan secara optimal.	Perencanaan ruang publik perlu menerapkan prinsip *universal design* melalui penyediaan toilet aksesibel, ramp, jalur landai, tempat duduk yang aman, area bermain anak yang terlindungi, serta elemen pendukung lain yang memastikan seluruh kelompok pengguna dapat mengakses ruang secara setara.
Akses Transportasi (Tantangan pada RTP Wainitu)	Keterbatasan akses transportasi, khususnya pada RTP Pantai Wainitu, menunjukkan bahwa keterjangkauan lokasi masih menjadi kendala bagi sebagian pengunjung, terutama yang bergantung pada angkutan umum.	Rencana perencanaan transportasi bisa mencakup penambahan jalur angkutan umum yang lebih sering dan mudah dijangkau untuk pengunjung, serta memperbaiki peta dan petunjuk arah menuju lokasi. Selain itu, keberadaan area drop-off atau tempat penurunan penumpang yang dekat dengan area pantai juga dapat mempermudah akses, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Pengelolaan Ruang Publik secara Berkelanjutan	Berdasarkan temuan-temuan di atas, pengelolaan ruang publik harus berfokus pada keberlanjutan. Ini mencakup pemeliharaan rutin fasilitas yang ada, peningkatan kapasitas untuk mengakomodasi pengunjung dengan beragam kebutuhan, serta menjaga keberagaman aktivitas yang dapat dilakukan di ruang publik tersebut, mulai dari rekreasi hingga kegiatan sosial.	Perencanaan untuk melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaannya untuk memastikan bahwa ruang publik tetap dapat aktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber: Penulis (2026)

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat konsep Keadilan Spasial (Spatial Justice) dan Desain Inklusif, yang menegaskan bahwa keberadaan fisik ruang publik tanpa aksesibilitas yang memadai menjadi tidak relevan bagi sebagian kelompok, khususnya kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia. Implikasi teoritis dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya aksesibilitas dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan berfungsi sosial, bukan hanya sekadar ruang yang ada secara fisik. Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya audit aksesibilitas secara berkala oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pertamanan atau PUPR, guna memastikan bahwa standar teknis pembangunan fasilitas publik, seperti jalur pemandu, ramp, dan alokasi parkir khusus disabilitas, benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan mobilitas. Secara sosial, rendahnya aksesibilitas ini dapat menyebabkan marginalisasi bagi kelompok rentan, yang akan terus mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial di ruang publik jika perbaikan akses lokasi dan parkir tidak segera dilakukan. Hal ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi tingkat kebahagiaan serta inklusivitas warga kota. Dalam konteks perencanaan ruang publik pesisir di kota kepulauan seperti Ambon, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang tantangan dan peluang perbaikan aksesibilitas fisik dan transportasi. Peningkatan desain fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan serta perbaikan akses transportasi akan mendukung terciptanya ruang publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip *Right to the City* yang menekankan hak setiap individu untuk mengakses ruang publik secara adil dan setara, serta mendukung pencapaian Tujuan 11 SDGs, yang mengupayakan penyediaan ruang publik yang aman dan mudah diakses oleh semua. Dengan demikian, peningkatan kualitas fasilitas dan pengelolaan ruang publik akan memperkuat kenyamanan dan partisipasi masyarakat, serta berkontribusi pada terciptanya Kota Ambon yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat lokal maupun global., tetapi juga mendukung terwujudnya Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan dalam agenda lokal maupun global.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RTP Pantai Wainitu dan RTP Pantai Amahusu sama-sama memiliki tingkat inklusivitas yang tinggi, sehingga keduanya telah

berfungsi cukup baik sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat. RTP Pantai Amahusu menunjukkan keunggulan pada akses eksternal, yang menegaskan pentingnya konektivitas transportasi dalam mendukung keterjangkauan ruang publik. Namun, kedua lokasi masih memiliki kelemahan pada akses internal, terutama terkait fasilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Dengan demikian, meskipun capaian inklusivitas tergolong baik, kualitas akses yang setara bagi seluruh pengguna belum sepenuhnya terwujud. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan ruang publik pesisir di Kota Ambon perlu diarahkan pada pemenuhan hak akses yang adil, sejalan dengan prinsip *Right to the City* dan Tujuan 11 SDGs. Dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan untuk pengembangan kota kedepan selaras dengan visi Pemerintah Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon dan pengelola RTP perlu memprioritaskan peningkatan akses internal melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan, seperti *ramp*, toilet aksesibel, area duduk yang aman, jalur pedestrian yang nyaman, dan *signage* yang jelas. Selain itu, sarana dasar seperti parkir, pintu masuk, penanda arah, dan sirkulasi masuk-keluar perlu dibenahi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan ruang publik. Integrasi dengan transportasi publik dan konektivitas kawasan juga perlu diperkuat agar RTP lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis perencanaan dan pengelolaan RTP berbasis inklusivitas dan *universal design*, serta mengembangkan evaluasi yang lebih sensitif terhadap pengalaman kelompok rentan di ruang publik. Karena setiap RTP memiliki karakteristik yang berbeda, strategi pengembangannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Upaya ini penting untuk mendukung pembangunan Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *Right to the City* dan Tujuan 11 SDGs.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian inklusivitas dengan menilai ruang terbuka publik lainnya di Kota Ambon, penggunaan metode analisis GIS dan fokus pada inklusivitas ekonomi untuk menciptakan peluang usaha yang setara, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2025). Kota Ambon dalam angka 2025. BPS Kota Ambon.https://ambonkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/62b02a83fac3db0fa40c7345/kota-ambon-dalam-angka-2025.html

Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. Journal of Extension, 50(2), Article 48. https://doi.org/10.34068/joe.50.02.48

Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press

Ihsanti, D. A., & Widiyani. (2024). Youth Empowerment in Urban Kampung Neighbourhood through Placemaking. A Case Study of Bandung and Jakarta, Indonesia. *Journal of Public Space*, *9*(2), 223–232. https://doi.org/10.32891/jps.v9i2.1790

Kusuma, A. (2024). Persepsi masyarakat terhadap penataan ruang publik dan fasilitas pejalan kaki di Kota Semarang. *JURNAL RIPTEK, 18*(1), 29–38 http://riptek.semarangkota.go.id48.http://riptek.semarangkota.go.id

Lefebvre, H. (1996). The right to the city. In E. Kofman & E. Lebas (Eds.), *Writings on cities* (pp. 63–181). Blackwell Publishers. https://theanarchistlibrary.org/library/henri-lefebvre-right-to-the-city

Li, L., & Wang, L. (2025). Insights into People's Perceptions Towards Urban Public Spaces Through Analysis of Social Media Reviews: A Case Study of Shanghai. *Buildings*, *15*(17). https://doi.org/10.3390/buildings15173033

Litman, T. A. (2025). *Evaluating Accessibility for Transport Planning Measuring People's Ability to Reach Desired Services and Activities Evaluating Accessibility for Transportation Planning*. https://doi.org/250-508-5150

Muhaling, T. N., & Basyar, M. R. (2023). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Destinasi Wisata Tengah Kota. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *1*(6), 96–110. https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i6.1070

Pemerintah Kota Ambon. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2025–2029. Ambon: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kota Ambon.

Pereira, A., & Rebelo, E. M. (2024). Women in public spaces: Perceptions and initiatives to promote gender equality. *Cities*, *154*. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105346

Putri, A. K., & Suranto. (2026). Analysis Of Physical Accessibility of Urban Space Facilities For Vulnerable Groups: Universal Design Principles in Tegal City. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *12*(1), 2026. http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/index

Putri, N. A., Mahmudi, N. A., Vevia, Y. L., Satria, W. D., & Asriana, N. (2024). Youth Space Development in Urban Kampong of Pondok Cina, Depok City, Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, *18*, 128–133. https://doi.org/10.26630/rj.v18i3.4650

Project for Public Spaces. (2005). What makes a successful place? PPS.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ufie, A. J. R. (2021). Ruang Publik Sebagai Tempat Wisata Kaum Milenial Kota Ambon. *Media Wisata*, *19*(1). https://doi.org/10.36275/mws

UN-Habitat. (2015). Global public space toolkit: From global principles to local policies and practice. United Nations.

Wang, Y., Hou, X., Wang, X., & Fan, W. (2025). Public Perception of Urban Recreational Spaces Based on Large Vision–Language Models: A Case Study of Beijing's Third Ring Area. *Land*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/land14112155